



http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium

Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Vol V Desember No. 2 2017

Pesantren dan Kewirausahaan

(Studi terhadap Pesantren Darul Khair Masing Kabupaten Banggai)

Israfil

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

israfilpenda@gmail.com

Abstract. Like a pesantren in a rural area with minimal facilities and infrastructure, away from the hustle and bustle of the city, and not burdening the cost of education to santrinya, of course, required a leader figure to initiate entrepreneurship to develop the empowerment of boarding. This study aims to determine the empowerment of pesantren through entrepreneurship developed. This research is qualitative descriptive research with method of data settlement through interview, observation involve, and documentation study. The results show the form of entrepreneurship developed in Pesantren Darul Khair Each in the form of carpentry business, cattle farming, plantation, rice fields and pesantren co-operatives. All business assets and business results to the foundation periodically every month. Allotment is used for the financial costs of boarding schools such as the cost of building and dormitory, electricity payment, air taps, telephone every month, the welfare of its managers such as teacher salaries, the cost of education of three teachers in Java, assisting extracurricular activities of santri and daily consumption of santri hostel.

Keywords: economy, entrepreneurship, pesantren.

Abstrak. Sebagai pesantren yang berada di pedesaan yang minim fasilitas sarana dan prasarana, jauh dari hiruk pikuk keramaian kota, serta tidak membebani biaya pendidikan kepada santrinya, tentunya diperlukan figur pimpinan untuk menggagas kewirausahaan untuk mengembangkan pemberdayaan pesantren yang dipimpinnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan pesantren melalui kewirausahaan yang dikembangkan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi terlibat, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kewirausahaan yang dikembangkan di Pesantren Darul Khair Masing diwujudkan dalam bentuk usaha pertukangan kayu, peternakan sapi, perkebunan, persawahan dan koperasi pesantren. Seluruh aset usaha dan hasil usaha diserahkan kepada yayasan secara periodik setiap bulannya. Peruntukannya digunakan untuk biaya finansial pondok pesantren seperti biaya pemeliharaan gedung dan asrama, pembayaran listrik, air PDAM, telepon setiap bulannya, kesejahteraan para pengelolanya seperti gaji guru, biaya pendidikan tiga orang guru di Jawa, membantu pendanaan kegiatan ekstrakurikuler santri dan konsumsi sehari-hari santri di asrama.

Kata kunci: ekonomi, kewirausahaan, pesantren.



PENDAHULUAN

Di era tahun 1970an pesantren telah mengalami pergeseran paradigma, tidak hanya memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan (tafaqqu fi al-din), tapi mencoba melakukan reposisi sebagai bagian dari upaya merespon dinamika kehidupan sosial. (Aziz, 2005:207).

Era reformasi, melalui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pesantren menjadi bagian integral dari Sisdiknas. Pesantren diberikan ruang menyelenggarakan berbagai ragam jenjang pendidikan mulai dari Paud, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Peran yang telah ditampilkan oleh pesantren dewasa ini, menunjukkan kepercayaan dan harapan masyarakat dan pemerintah terhadap pesantren sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, pesantren tetap eksis, bahkan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah maupun ragam tipe dan coraknya.

Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang dilegitimasi menyelenggarakan pendidikan keagamaan, sebagaimana lembaga pendidikan lainnya, dalam Undang Undang Sisdiknas 2 ayat (4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik, dalam proses pembelajaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan khususnya termaktub pada bab III pasal 26 menyebutkan pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014, pada pasal 2 ayat b dan c, juga menyebutkan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan: (a) mengembangan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam kehidupannya sehari-hari, dan (b) mengembangkan perilaku akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawaddu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat dan cinta tanah air.

Peran pesantren di masyarakat dilihat dari sisi kepercayaan dan harapan masyarakat telah Nampak jelas. Begitupun kepercayaan pemerintah terhadap pesantren sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Tidak hanya itu, perlu juga dilihat perannya sebagai lembaga pendidikan yang berwatak kewirausahaan.

Kewiraausahaan salah satunya adalah aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi merupakan jalan untuk hidup sejahtera. Sementera hidup yang sejahtera (hasanah) adalah anjuran agama, sebagaimana dalam ungkapan kada al-fagru an vakuna kufran (kekafiran atau kemiskinan mendekatkan pada kekufuran), maka pemikiran tentang pengembangan ekonomi adalah hal yang sangat penting. (Muin, 2007:3). Dengan demikian, doktrin agama turut mempengaruhi terbentuknya kelembagaan ekonomi dan tentu praktek-praktek atau perilaku ekonomi. (Boulding, 1970:180).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) melalui Dirjen Pendidikan Islam menyusun telah roadmap pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren bekerjasama dengan Bank Indonesia. kesepahaman ini telah ditandatangani oleh Menteri Agama Lukman Hakim dan Gubernur BI pada tanggal 5 Nopember 2014. Tujuannya adalah meningkatkan kapabilitas dan keterampilan lembaga pondok pesantren melalui bantuan teknis berupa pelatihan, pendampingan kelembagaan dan pengelolaan keuangan, serta peningkatan kewirausahaan para santri. Juga untuk mendorong pondok pesantren sebagai penggerak sekaligus



berperan sebagai instrument sektor riil ekonomi berbasis masyarakat.

Hanya saja, bantuan yang diharapkan dari pemerintah masih dirasa kurang, bahkan terkesan tebang pilih dalam memberikan bantuan, siapa yang dekat dengan pengambil kebijakan, maka dialah yang dapat bantuan. Sehingga, bisa berdampak secara politis mempengaruhi roda kepemimpinan dan sistem pembelajaran di pesantren.

Menurut data pesantren di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 tercatat 123 lembaga pesantren, data 2016 tercatat 96 lembaga. Hanya saja, dalam kurun waktu 2009 – 2016, data pesantren di Kanwil Kemenag Provinsi Sulteng, mengalami penurunan 27 pesantren dari 123 menjadi 96. Dalam kurun waktu 8 tahun telah mengalami penurunan 31 lembaga. (Data Emis Kanwil Kemenag Palu, 2016).

melihat Dengan penurunan kuantitas pesantren yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, disinyalir salah satu penyebabnya adalah kondisi keuangan pesantren yang tidak memadai. Seperti penuturan pimpinan Pondok Pesantren Darul Khair Masing K.H. Muslimin Lahaji, bahwa pernah kami diundang oleh Bupati Banggai, semua pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Banggai di undang hadir. Pak Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa, pesantren yang tidak bisa mengelola pendidikan dengan baik dan tidak memiliki dana, lebih baik bubar saja. (Wawancara, tanggal 23 Maret 2017).

Keterangan yang dilontarkan oleh Bupati Banggai di atas, banyak menuai protes dari pimpinan pondok pesantren. Termasuk K.H. Muslimin Lahaji. Mengingat dan pesantren masyarakat adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, karena keberadaan atau pendirian lembaga pesantren adalah keinginan masyarakat dan komunitas pesantren di mana pesantren didirikan. Tugas kiai adalah untuk menyediakan ruang kepada masyarakat mengambil peran pemberdayaan di dalam usaha pesantren. Pemerintah seharusnya memberi bantuan dana dan ruang untuk pengembangannya ke depan.

Model-model pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren telah bermunculan di manamana mulai dari skala yang paling kecil sampai besar, misalnya koperasi pesantren, mini market, Baitul Mal Watanwil (BMT) sebagai perwujudan paradigma untuk menopang keberlangsungan hidup sebuah pesantren. Seperti yang dilakukan oleh pesantren-pesantren besar yang ada di Jawa, semisal Pesantren Sidogiri yang mempunyai banyak usaha seperti swalayan dan tokoh-tokoh kelontong.

Menurut Nadzir, setidaknya ada tiga macam pola usaha ekonomi di lingkungan pesantren: Pertama, usaha ekonomi yang berpusat pada kiai sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam mengembangkan pesantren. Misalnya seorang kiai mempunyai perkebunan cengkih yang luas. Untuk pemeliharaan dan pemanenan, kiai melibatkan santri-santrinya untuk mengerjakannya, sehingga terjadilah hubungan mutualisme saling menguntungkan, kiai dapat memproduksikan perkebunannya, santri mempunyai pendapat tambahan dan ujungnya dengan keuntungan yang dihasilkan dari perkebunan cengkeh maka kiai dapat menghidupi kebutuhan pengembangan pesantrennya. Kedua, usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren. Misalnya pesantren memiliki usaha produktif seperti menyewakan gedung pertemuan, rumah dan sebagainya. Dari keuntungan usaha-usaha produktif ini pesantren mampu membiayai dirinya, sehingga seluruh biaya operasional pesantren dapat ditalangi oleh usaha ekonomi ini. Ketiga, ekonomi santri dengan memberikan keterampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak keterampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren. Pesantren membuat pendidikan sedemikian program rupa berkaitan dengan usaha ekonomi seperti pertanian peternakan. Tujuan semata-mata untuk membekali santri agar mempunyai keterampilan tambahan, dengan harapan menjadi bekal dan alat untuk mencari pendapatan hidup. (Nadzir, 2015:48)

Dari ketiga pola usaha ekonomi dikemukakan di atas, maka persoalan usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren menjadi sorotan dalam penelitian ini.



Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kewirausaaan dan manajemen pengelolaannya di Pesantren Darul Khair Masing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darul Khair Masing Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan mengkaji usaha-usaha ekonomi yang dikembangkan serta kreatifitas pesantren dalam manajemen dan pengelolaannya. Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul di analisa lebih bersifat kualitaif (Sugiono, 2012: 1). Data yang ditelusuri meliputi data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian adalah kiai, pengasuh pondok pesantren, santri, dan alumni pesantren. Metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Observasi adalah kemampuan seorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pencarian mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (Burhan Bungin, 2008: 115). terlibat Observasi (participatory observation) dilakukan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul diproses dan dideskripsi secara naratif sesuai temuan penelitian. Wawancara adalah cara mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden/informan, seperti apa yang dikatakan Sugiyono, seorang dalam melakukan peneliti wawancara, pengumpulan data setelah penyiapan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternativ jawabannya pun telah disiapkan. Setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya (Sugiyono, 2011:141). Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen, foto-foto dan bahan statistik. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan, maka mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.

PEMBAHASAN

Mengenal Pesantren Darul Khair Masing

Pondok Pesantren Darul Khair Masing berdiri di atas lahan seluas 10 Ha dan beralamat di Jalan Raya Masing, Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Masing terletak kurang lebih 70 km dari pusat ibukota Kabupaten Banggai, jauh dari hiruk pikuknya keramaian kota. Berada kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut (Teluk Tolo), Pondok pesantren ini juga berada di antara dua proyek MIGAS terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni PT. JOB PMTS Pertamina-Medco Ep. Tomori Sulawesi dengan PT. PPGM (Proyek Pengembangan Gas Matindok) dan PT. DS LNG yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, 2 Agustus 2015. Di daerah ini juga terdapat penangkaran jenis burung yang cukup langka dan dilindungi yaitu burung maleo.

Pondok Darul Khair Masing didirikan oleh K.H. Muslimin Lahaji pada tahun 1997. Pak Ustadz Muslimin nama panggilan sehari-harinya di pondok, beliau lahir di Desa Masing, tanggal 17 April 1965. Orangtua beliau adalah migran Bugis dari Bone. Ketika itu, setelah beliau menimbah ilmu di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang Jawa Timur selama 12 tahun, terbersik niat untuk mendirikan sebuah pondok pesantren di kampung halaman sendiri Niat beliau (Desa Masing), adalah untuk membangun generasi Islam, baik lahiriyah maupun bathiniyah, berilmu pengetahuan tinggi, berwawasan luas, berkeimanan yang kuat, bertakwa kepada Allah Swt, beraklak mulia, serta bertanggungjawab dalam menerima dan menjalankan kehidupannya.

Nama Darul Khair muncul ketika pendidiri ini terinspirasi oleh pesantren dua tokoh kharismatik penggerak dakwah islamiyah yakni Al Mukarram Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri, pendiri Perguruan Islam Alkhairaat dan Prof. Dr. K.H. Musta'in Romly pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Kedua pesantren tersebut merupakan tempat K.H. Muslimin Lahaji menimba ilmu. Darul dari nama Darul Ulum dan Khair dari nama Alkhairaat. Nama Darul Khair artinya adalah rumah kebaikan.



Pondok Pesantren Darul Khair Masing didirikan di Jombang Jawa Timur pada hari Rabu, 22 Mei 1991, dengan Akta Notaris Bazron Humam,SH Nomor 27 dan telah dirubah pada tanggal 6 September 1991 dengan Akta Notaris Hans Kansil, SH di Palu Sulawesi Tengah.

Adapun struktur organisasi Pondok Pesantren Darul Khair Masing: Ketua K.H. Muslimin Lahaji, SH; Wakil ketua H. Jamil T. Siregar; Sekretaris Nurul Amin; Wakil sekretaris Patiroi, S.Pd; Bendahara Hj. Dian Rifia, S.Pd.; Wakil bendahara Hj. Halwiah Ishaq; Koordinator bidang pendidikan Abdullahi Ishaq, S. Fil, Koordinator bidang kepondokan; Kuswanto, A.Ma.; Koordinator bidang usaha ekonomi Muh. Mu'an.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki

Pada saat penelitian ini dilaksanakan secara kuantitas jumlah santri yang melaksanakan program pendidikan di Pondok Pesantren Darul Khair Masing adalah sebagai berikut: Madrasah Ibtidaiyah 120 orang, Madrasah Tsanawiyah 97 orang, Madrasah Aliyah 89 orang, SMP 99 orang. Sedangkan santri yang mukim (belajar kitab) 55 orang anak. Dengan dibina sekitar 72 orang guru/ustadz.

Dalam menjalankan roda kepemimpinan di Pondok Pesantren Darul Khair Masing, K.H. Muslimin Lahaji tidak sendiri, beliau dibantu beberapa orang pengasuh, yaitu: K. Muh. Syauqi, Am.Pd, Ust. Abdullah Ishaq, S.Fil, M.Pd, Ust. Kuswantono, A.Ma, Ust. Patiroi, S.Pd., Ust. Rismanto, S.Pd.I, Ust. Ahmad Subhan, Ust. Sobihul Arifin, Ust. Muh. Mu'an, S.Sos., Ustz. Rasmawati, S.Pd.I, Ustz. Rabia B. Lahaji, S.Pd, Ustz. Sriwediningsih, dan Ustz. Hasmida, A.Ma.

Program pendidikan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Khair Masing, adalah: Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, SMP, Madrasah Diniyah (Wustho, Ulya, yang dipondokkan), dan TPA/TPQ, serta Majelis Taklim. Kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum Kementerian Agama, Kementerian Dikbud, dan Kurikulum Pesantren yang banyak diadopsi dari Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang).

Ghirah masyarakat untuk memasukkan anaknya di Pesantren Darul Khair Masing, sangat besar. Saking kepercayaannya terhadap institusi telah pesantren, masyarakat "memaksakan" kehendaknya untuk memasukkan anaknya di pesantren. Sehingga pimpinan pesantren merasa karena rata-rata mereka adalah kewalahan, keluarga petani dan nelayan yang tidak memiliki penghasilan yang cukup. Menurut penuturan K.H. Muslimin Lahaji, bahwa untuk mengantisipasi yang demikian itu, maka kami memberikan subsidi kepada santri yang kurang mampu (menggratiskan). Selain itu, kalau mereka tidak punya uang kas, kami juga menerima apa saja yang dimiliki oleh orangtua santri, biasanya kalau ada sayuran, beras, ikan, apa saja, batu sebiji sekalipun kami terima. (Wawancara, tanggal 20 Maret 2016 di Pondok Pesantren Darul Khair Masing).

Pesantren Darul Khair Masing memiliki potensi lahan yang cukup luas, meskipun tersebar di berbagai lokasi. Dari lahan yang ada dan belum termanfaatkan, menjadi tantangan pengasuh dan pengelola pondok untuk mengembangkannya. Potensi-potensi itu antara lain: 10 Ha untuk areal persawahan, 5 Ha untuk tanaman kakao, 2 Ha kelapa hibrida, 4 Ha untuk budidaya tambak, dan 15 Ha untuk tanaman industri.

Ide dan gagasan yang dimiliki oleh figur kiai yang visioner dalam menangkap peluang ekonomi ditunjukkan oleh K.H. Muslimin Lahaji dengan pemikirannya yang sangat maju. Karena memang beliau banyak belajar dari berbagai pengalaman. Semasa kuliah dulu, beliau aktif di berbagai organisasasi kemahasiswaan, bahkan sampai sekarang beliau terpilih sebagai Ketua Persatuan Pesantren Agrobisnis.

Bentuk Kewirausahaan di Pesantren Darul Khair Masing

Sebagai pesantren yang berada di pedesaan yang minim fasilitas sarana dan prasarana, jauh dari hiruk pikuk keramaian kota, serta tidak membebani biaya kepada santrinya. Maka diperlukan figur pimpinan untuk mengembangkan kewirausahaan untuk menanggulanginya. Hal ini telah dilakukan oleh Pesantren Darul Khair Masing dalam



memberikan kontribusi yang cukup banyak di tengah masyarakat di Desa Masing, terutama dalam upaya memberikan pemahaman keagamaan dan mengangkat perekonomi masyarakat.

Sebagai putra daerah dan pengelola pesantren, K.H. Muslimin Lahaji mengagas kreasi ekonomi melalui berbagai usaha yang dikembangkan terutama untuk menambah pemasukan finansial bagi pengembangan pondok pesantren dan juga sebagai sarana pendidikan dan pelatihan bagi santri. Nurcholis Madjid mengatakan bahwa memberi bekal dan keahlian tertentu kepada santri adalah salah satu upaya memberi maslahat pada santri, pesantren, dan masyarakat dimana pesantren itu berada. (Madjid, 1998:45). Tuntutan pengembangan ini lakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan finansial pondok pesantren, dan tidak tergantung pada bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Usaha-usaha tersebut secara kreatif diwujudkan dalam:

Usaha pertukangan kayu

Usaha ini mulai digarap oleh pengelola pesantren, sejak adanya alumni pesantren yang berhasil di luar pesantren (masyarakat), membuka usaha pertukangan kayu. Dengan melihat peluang usaha pertukangan yang dimiliki oleh alumni, maka pihak pengelola menawarkannya kepada alumni untuk bermitra kerja dengan pesantren. Ajakan pengelola pesantren disambut baik oleh alumninya. Dalam kegiatan ini, santri tidak secara langsung terlibat dalam usaha ini, akan tetapi pihak santri bisa mengambil pelajaran dari usaha dengan kunjungan ke lokasi untuk melihat bagaimana cara dan teknik mempergunakan alat pertukangan.

Jenis pekerjaan yang dikembangkan adalah pembuatan kusen/daun pintu, jendela, meja, kursi, dan lemari kayu. Dalam kegiatan usaha ini, pondok pesantren awalnya telah menyediakan alat pertukangan dengan swadaya pesantren dan pernah mendapat bantuan dari pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan). User/pengguna jasa ini adalah masyarakat sekitar pondok dan pesantren itu sendiri. Masyarakat misalnya membutuhkan pembuatan kusen/daun pintu dan jendela untuk rumahnya. Di samping itu, dengan adanya usaha

pertukangan ini beban pesantren menjadi berkurang, termasuk untuk biaya penyedian alatalat meubilair yang sudah rusak seperti meja, kursi, dan lemari kayu tidak lagi memesan dan membuatnya di luar.

Peternakan sapi

Usaha ini dikembangkan berada satu lokasi di areal pondok pesantren. Pengelola pondok melihat ketersediaan lahan yang masih kosong dan tidak produktif lagi. Selain itu, dengan membuka usaha ternak sapi, bisa membuka peluang bagi santri untuk dilibatkan secara langsung terutama dalam memberi pakan ternak.

Meskipun usaha ini masih terbilang baru dan mulai dirintis dengan penyediaan sapi sebanyak 10 ekor. Awalnya usaha ini, dimulai dengan adanya keinginan pengelola pondok untuk memelihara sapi tapi belum mempunyai modal untuk pengadaan bibitnya. Pengelola pondok berinisiatif untuk bermitra dengan wali santri yang mempunyai hewan ternak sapi. Dari situ pengadaan sapi dimulai dari adanya wali santri yang bersedia menitipkan sapinya untuk dipelihara. Melihat perkembangnya yang cukup menggembirakan, pengelola pondok mulai membeli sapi untuk dipelihara. Hanya saja memang pengembangan di dalam usaha ini dinilai hasilnya cukup lama dan bisa dinikmati setelah tiga tahun.

Bentuk kerjasama dengan wali santri yang menitipkan sapinya dengan sistem bagi hasil, yaitu dibagi tiga. Misalnya sapi wali santri melahirkan tiga ekor, pesantren dapat dua ekor wali santri dapat satu ekor. Prospek pengembangan usaha ini cukup menjanjikan, prospeknya cukup bagus, sehingga pengelola pesantren telah merancang usaha ini. Pengelola pondok mulai berani bermitra dengan pemerintah (Kementerian Pertanian/Dirjen Peternakan) dengan menargetkan 100 ekor sapi dengan asumsi pendapatan 1,5 milyar per tahun.

"Tahun ini, kami mulai seriusi usaha ini, karena cukup menjajikan, karena itu kami akan bermitra dengan pemerintah, menurut hitunghitungan saya, hasilnya bisa mencapai 1,5 milyar pertahun". Demikian penuturan pak kiai Muslimin La Haji (Wawancara, tanggal 13 Maret 2017).



Di samping itu, lahan untuk pakan ternak sapi cukup luas. Hal yang tak kalah pentingnya adalah masalah keamanannya juga terjamin sudah dipersiapkan kandang-kandang, meskipun di lepas tidak akan hilang, karena berada di areal pesantren yang dikelilingi oleh pagar. Hanya saja, kendalanya ada ketika tiba musim kemarau panjang, banyak rumput-rumput yang mati, tapi kondisi seperti ini tidak lalu mengkhawatirkan, biasanya santri dan pengelola pesantren menggiring sapi-sapinya ke persawahan yang sudah dipanen untuk memakan sisa batang-batang padi.

Usaha perkebunan

Pondok Pesantren Darul Khair Masing, juga memiliki lahan seluas kurang lebih 17 Ha. Lahan seluas itu dimanfaatkan pengelola pondok bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar punya pondok yang tidak lahan untuk mengelolanya. Pengelola pondok mulai melirik tanaman kelapa hibrida dan tanaman pohon penghasil kertas (akasia), serta pohon jati. Pemeliharaan dan pupuknya semua ditanggung atau ditangani oleh pengelola (masyarkat). Dengan sistem bagi hasil. Pengelola (masyarakat) mendapat dua bagian, sedangkan pemilik (pesantren) dapat satu bagian. Pemilik tinggal menerima hasilnya. Hasilnya perkebunan ini bisa dinikmati oleh pengelola pesantren setiap 3 - 4 bulan.

Persawahan

Pesantren Darul Khair Masing memiliki lahan sekitar 10 Ha untuk persawahan. Hasil dari persawahan selain untuk konsumsi santri dan pengelola, juga untuk dijual kepada masyarakat. Unit kegiatan ini mengelola yang adalah halnya dengan masyarakat. Sama usaha perkebunan kelapa yang dikembangkan oleh pesantren, semua ditangani pondok oleh masyarakat. Pemilik (pesantren) tinggal terima beres. Artinya pesantren sebatas menyediakan lahan. Pengadaan bibit, pupuk, pemeliharaan, dan pengolahan hasil, dan sebagainya ditangani oleh masyarakat.

Koperasi pesantren

Usaha ini dikelola untuk memberdayakan santri dan pengasuh/guru untuk menjaga dan melayani pelanggan. Koperasi pesantren mensuplai kebutuhan sehari-hari santri dan pengasuh/guru. Termasuk simpan pinjam untuk pengasuh/pengelola, juga membuka pertokoan dengan menjual 9 bahan pokok sehari-hari, sehingga santri dan pengasuh/guru tidak keluar untuk belanja kebutuhan sehari-hari diperlukan seperti membeli sabun, pepsodent, dan sebagainya dengan harga tidak berbeda jauh di luar. Selain itu, juga tersedia fotocopy, dan barang ATK untuk keperluan pondok dan masyarakat sekitar.

Masyarakat sekitar pondok pesantren tidak perlu jauh-jauh lagi ke pasar ibukota kecamatan untuk berbelanja kebutuhan pokok, karena kebutuhan pokoknya sudah ada di jual di koperasi pesantren. Begitupun jika ingin fotocopy dan keperluan buku dan alat tulis lainya untuk anakanaknya.

Manajemen Pengelolaannya

Manajemen pengelolaan setiap usaha yang dilakukan di Pesantren Darul Khair Masing dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasannya itu dilakukan oleh pimpinan pondok sebagai sentralnya, sehingga manajemennya terkesan masih sangat sederhana. Kemudian mengangkat beberapa orang ustaz sebagai penanggungjawab setiap bidang usaha.

Otoritas pimpinan pondok (kiai), sangat besar dan tidak bisa diganggu gugat. Sistem seperti ini kerap kali mengundang sindiran bahwa pesantren seperti kerajaan kecil (Sulthon dan Khusnurridho, 2003:115). Kyai sebagai pemilik pesantren dan sekaligus sebagai mahaguru yang sangat didengar oleh para santrinya. (Djohan Effendi, 2010:3).

Pola penggajian atau pengupahan sudah diatur sedemikian rupa oleh pimpinan pondok pesantren dengan sistem bagi hasil untuk usaha ekonomi bidang peternakan sapi, perkebunan, dan persawahan. Sedangkan untuk koperasi pesantren, pegawai/ustadz yang mengelolanya adalah santri dan pengasuh/ustadz, sehingga tidak digaji, karena



sudah inklud dalam gaji per bulannya. Sementara santri yang berpartisipasi dalam peternakan sapi dan koperasi pesantren tidak menerima apa-apa, kecuali ilmu pengetahuan dan prakteknya di lapangan. Ada hubungan mutualisme saling menguntungkan, kiai dapat hasil ternaknya atau untungnya, santri dapat ilmunya, biaya hidupnya gratis di pondok. Sebagaimana pandangan Ali Maschan, bahwa tugas pokok kyai adalah menciptakan kesejahteraan umum melalui penguatan civil society. Peran ini dilakukan melalui dimensi ekonomi, pendidikan, dan penegakkan amar makruf nahi mungkar, yang diarahkan pada kesejahteraan upaya menciptakan bersama. (Hakim, 2004:115).

Setiap kegiatan usaha ekonomi yang dijalankan sudah ada pengelola/ustadz yang bertanggungjawab disitu, seperti usaha ekonomi meliputi: peternakan sapi, perkebunan, persawahan, dan koperasi ditangani oleh Muh. Mu'an, usaha pertukangan ditangani oleh ustadz Hasrun Hamzah.

Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan, disetor ke devisi keuangan, biasa diisitilahkan oleh pimpinan pondok sebagai "menteri keuangan" Pondok Pesantren Darul Khair Masing yang dipercayakan kepada ibu Hj. Dian Rifia, S.Pd. Nanti menteri membagi-bagikan ke setiap bidang (bendahara): MI, MTs, SMP, MA, Madrasah Diniyah (santri mondok). Termasuk di dalamnya pengeluaranpengeluaran seperi: gaji guru/ustadz, biaya makan santri, biaya pondok, listrik, PDAM, pemeliharaan gedung, kesejahteraan, dan biaya operasional lainnya. Dana yang terkumpulan dari setiap usaha yang dikembangkan itu diserah secara periodik ke menteri keuangan Pondok Pesantren Darul Khair Masing. Menurut pimpinan pondoknya, bahwa usaha-usaha yang kita lakukan, hasilnya kita kumpulkan, kalau kita kalkulasi mencapai kurang lebih Rp.44.000,000 setiap bulannya, uang tersebut dimanfaatkan terutama untuk kebutuhan finansial pondok, sebagai gaji guru/ustadz, pengelola, biaya acara-acara pondok, termasuk juga ada guru/ustadz yang kita sekolahkan, dan lain-lain (Wawancara, tanggal 13 Maret 2017).

Bidang usaha ekonomi pesantren yang dikelola tersebut baru koperasi pesantren yang sudah memiliki badan hukum dengan nomor 33/BH/-KDK.19/4/VII/2000, tanggal 1 Juli 2000, usaha lainnya belum memiliki, karena pengelola pondok lagi mencari mitra kerja yang cocok untuk kerjasama.

Bentuk kewirausahaan yang dikembangkan tersebut, bukan tidak mungkin mempunyai berbagai kendala dan tantangan yang menyertainya baik dari segi manajemennya, SDM maupun terkait aplikasinya di lapangan, maka ke depan perlu membangun jaringan dan menjalin mitra kerja dengan berbagai pihak yang terkait.

Kemandirian perekenomian untuk membangun tatanan ekonomi Pesantren Darul Khair Masing, memang telah dipersiapkan sejak awal untuk mempersiapkan diri secara sungguhsungguh, tidak hanya pada aspek mental spritual, tapi juga aspek sosial ekonomi. Jiwa dan semangat entrepreneurship yang dimiliki K.H. Muslim Lahaji, selaku pimpinan pondok sebenarnya tertanam sejak beliau masih nyantri dan kuliah di Jawa, dimana beliau selain aktivis juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Selain itu, sikap kepekaannya terhadap persoalan sosial di masyarakat terutama masalah moral kemiskinan, apatahlagi di daerahnya ini mayoritas penduduknya adalah pendatang. Di samping itu, image yang berkembang di masyarakat selama ini bahwa pesantren bahwa pesantren adalah lembaga yang mengandalkan bantuan lewat proposal dana bantuan, hal ini tentu tidak berlaku bagi Pondok Pesantren Darul Khair Masing.

KESMPULAN

Terbatasnya bantuan dari pemerintah terkait seperti dari pemerintah daerah dan Kementerian Agama, dalam hal bantuan operasional pesantren pesantren, membuat banyak pesantren mulai mengembangkan pemberdayaan ekonomi yang dimiliki. Selain itu, kebutuhan pesantren untuk menghidupi dirinya juga semakin meningkat. Santri juga dituntut untuk menambah keterampilan dalam menghadapi perannya di masyarakat kelak. Kebutuhan finansial pondok pesantren seperti



pengeluaran gaji guru/ustadz, biaya makan santri, biaya pondok, listrik, PDAM, pemeliharaan gedung, kesejahteraan, dan biaya operasional lainnya.

Maju mundurnya sebuah lembaga pesantren kepada pengelolanya. **Termasuk** tergantung kreatifitas pengelola dalam usaha ekonomi. Pondok Pesantren Darul Khair Masing melakukan usaha ekonomi untuk dikembangkan, meskipun spektrumnya dalam skala kecil tapi mampu memberdayakan santrinya dan masyarakat tersebut, sekitarnya. Bentuk kewirausahaan meliputi: (1) Usaha pertukangan, yang menggarap usaha ini adalah alumni pesantren; (2) peternakan sapi dengan melibatkan pengelola dan santri di dalamnya. (3) usaha perkebunan kelapa hibrida dan hutan tanaman industri penghasil kertas (akasia), serta pohon jati. Usaha ini digarap oleh masyarakat secara keseluruhan; (4) Usaha persawahan, juga dikelola oleh masyarakat; dan (5) koperasi pesantren yang peruntukannya untuk kalangan pesantren dan masyarakat sekitarnya.

Manajemen pengelolaan usaha ekonomi yang dilakukan di Pesantren Darul Khair Masing, masih menerapkan sistem manejemen yang sederhana, sehingga permasalahan klasikal banyak ditemui seperti SDM yang profesional masih kurang. Untuk itu, pihak pengelola pesantren saat ini masih membuka diri dan memerlukan orangorang militan bukan radikal untuk mengembangkan usaha ekonominya ke depan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pondok Pesantren Darul Khair Masing Bapak K.H. Muslimin Lahaji, SH dan pengasuh pondok lainnya atas kesediaannya memberikan data-data pesantren dan terima kasih kepada pihak redaksi jurnal Equilibrium yang bersedia memuat tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azis, Moh. Ali. 2005. "Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Umat" dalam A. Halim, Rr. Suhartini, M. Choirul Arif. A. Sunaryo AS (Eds). *Manajemen Pesantren*. Jogjakarta: LKiS.
- [2] Azra, Asyumaridi. 1999. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logis Wacana Ilmu.
- [3] Boulding, Keneth E. 1970 . *Beyon Economics, Essay On Society, Religion and Ethics*. Ann Arbor: The University of Michigan.

- [4] Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kuantitatif*. Kencana, Jakarta.
- [5] Effendi, Djohan. 2010. Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi. Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gusdur. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- [6] Hurairah, 2008.Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung Humaniara.
- [7] Juhardi, AS. 2009. "Pengembangan Ekonomi Pesantren. Kasus PP. Al-Kautsar Tenaya Raya Pekanbaru Riau" dalam Jurnal Edukasi Vol. VII, No. 1 Januari-Maret.
- [8] Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. 2016. Data Emis Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- [9] Kementerian Agama Republik Indonesia. Online. https://www.kemenag.go.id/-berita/438414/kemenag-susun-roadmap-pengembangan. Diakses 7 April 2017.
- [10] Khotibul Umam.2016. Pendidikan Kewirausahaan di Pesantren Sebagai Upaya Dalam Membangun Semangat Para Santri Untuk Berwirausaha.http://ejournal.staimtulungaung.ac.id/indekx/php/Eksyar. Diakses tanggal 1 Maret 2016.
- [11] Khusnurridho M dan Masyhud, M. Sulthon. 2003. *Manajemen Pondok Pesantren Cet. I.* Jakarta: Diva Pustaka.
- [12] Lukman, Hakim. 2004. *Perlawanan Islam Kultural.* Surabaya: Pustaka Eureka.
- [13] Madjid, Nurcholis. 1998. *Bilik-Bilik Pesantren.* Jakarta: Dian Rakyat.
- [14] Muin, M. (dkk). 2007. Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren. Jakarta: CV. Prasasti.
- [15] Nadzir. 2015. "Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren" dalam E-conomica, Vol.VI Edisi 1 Mei. Semarang: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam IAIN Wali Songo.
- [16] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- [18] Prajono, O.S. dan Pranarka, A.M.W.1996. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
- [19] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi* (*Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta.
- [20] Suharto, Edi.2005. Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional